



Radar Bali

Kelompok TPST II Petang Kecewa

MANGUPURA - Kelompok Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) II Tandansari Banjar Dinas Angantiga, Desa Petang, Kecamatan Petang kecewa. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) (sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Badung dinilai hanya sekedar memberi bantuan tanpa ada tindak lanjut. Bahkan, pemberian bantuan itu juga sempat diperiksa petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Bali.

Ketua Kelompok TPST II Petang, Ketut Sukarta, 42, mengatakan, pihaknya sempat mendapat bantuan pembangunan TPST senilai Rp 195 juta tahun 2015 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (saat itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan/DKP) yang dibangun di atas lahan miliknya. "Tapi yang diberikan bantuan awalnya hanya bangunan dan baru beberapa waktu lalu itu diberikan mesin



DWIJA PUTRA/RADAR BALI

KOMPOS: Aktivitas di Kelompok TPST II Petang yang memproduksi pupuk kompos, Senin lalu.

dua, padahal saya sudah punya. Saya beli dulu, mesin sidi atau semacam filter harganya Rp 30 juta dan cooper Rp17 juta," terangnya, Senin (27/2) lalu.

Bahkan, kelompok tersebut sejatinya tidak pernah mengajukan bantuan tersebut, tapi seketika diberikan oleh pemerintah. Parahnya, setelah diberikan bantuan, tidak ada tindak lanjut. Artinya dibiarkan begitu

saja tanpa ada pembinaan lebih lanjut dari pemerintah. "Pas ada pemeriksaan baru minta kerja sama, tapi saya *kan* tidak mau begitu," ujarnya.

Dia menuding kalau yang diaudit hanya pihaknya, tentu hasil audit tajam ke bawah. Kalau memang benar-benar pemerintah mengaudit bantuan ini mestinya dari tingkat atas dalam hal ini DLHK Badung.

"Saya bilang, 'tolong audit di tingkat kepala Dinas. Setelah jadi barang, mau dibawa ke mana? Mau saya timbun di sini sampai tinggi kayak di Suwung (TPA Suwung)? Untuk bayar tenaga, pakai uang kakeknya ibu? Kalau ibu tidak puas, silakan angkat ini bu?'" jelasnya mengulang jawaban dirinya kepada petugas BPK beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, Kelompok TPST ini sejatinya memproduksi pupuk kompos. Namun, sejak petani mendapat bantuan pupuk organik gratis, produksinya tidak laku lagi. Dia mempersoalkan kenapa pemerintah justru membeli pupuk dari luar. Dan yang dia kecewa, tidak ada bantuan dari pemerintah untuk operasional. Akibatnya, untuk tetap memproduksi, pupuk ini dijual ke luar kabupaten. Dikonfirmasi terpisah, kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan via telepon dan SMS dari Senin hingga Selasa kemarin tidak ada jawaban. (dwi/yor)

Edisi : Rabu, 1 Maret 2017

Hal : 23